

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELAJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014

INFLUENCE OF REAL EARNING INCOME (PAD), AND GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) to CAPITAL EXPENDITURE IN REGENCY/CITY IN BENGKULU PROVINCE at 2010-2014

Oleh : Novita Dwi Astuti

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Novitadwiastuti54@yahoo.com

Isroah, M.Si.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, 2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, 3) Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014 yang berjumlah 10 kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279, koefisien regresi sebesar 0,587, koefisien determinasi (r^2) 0,078; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426, koefisien regresi sebesar 0,155, koefisien determinasi 0,181; 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,476, koefisien determinasi sebesar 0,227.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Moda

Abstract

This study aims to: 1) Know the influence of real earning income (PAD) to the Capital Expenditure in Districts in Cities in Bengkulu Province at 2010-2014, 2) To know the effect of General Allocation Fund (DAU) to Capital Expenditure in Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014, 3) Know the influence of real earning income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) to Capital Expenditure in Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014. Population in this research were all Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014 which amounted 10 regency and city. collecting data Technique im this study were documentation method. Prerequisite test of data analysis used multicolonierity test, heterokedastisity test, and autocorrelation test. Hypothesis test used simple linear regression and multiple linear regression analysis. The results showed that: 1) Local real aerning income (PAD) had positive influence to Capital Expenditure. This was indicated by the value of correlation coefficient (r) of 0,279, regretion coefficient 0,587, determination coefficient 0,078; 2) General Allocation Fund (DAU) had a positive influence to Capital Expenditure, indicated by positive value of correlation coefficient (r) of 0.426, regretion coefficient 0,155, determination coefficient 0,181; 3) Real Earning Income (PAD) and General Allocation Fund

(DAU) simultaneously had a positive influence on Capital Expenditure, shown by the correlation coefficient (R) of 0,476, determination coefficient 0,227.

Keywords: local real earning income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanjanya untuk hal-hal

yang produktif. Seperti yang dikemukakan oleh Saragih (2003), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Dengan adanya pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan pernyataan Yohanes Yuli Ari Widodo dalam Abdul Halim (2011: 225) menyatakan bahwa apabila pemerintah Indonesia mampu untuk melakukan belanja modal dengan bijaksana, maka diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional. Selain itu pada tahun 2011 Bank

Dunia telah mengingatkan kepada pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintah.

Namun kenyataannya belanja daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin yang kurang produktif. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa rasio belanja modal lebih kecil dari pada rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2014 besarnya belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu rata-rata hanya sebesar 21,53% dari total belanja, sedangkan besarnya belanja pegawai rata-rata sebesar 47,88% dari total belanja. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa hampir 50% dari total belanja daerah digunakan untuk membayar upah/gaji pegawai pemerintah daerah. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang mempunyai rasio belanja modal terhadap total belanja daerah secara agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan nilai dibawah rata-rata yakni pada tahun 2011 besarnya rasio belanja modal sebesar 21.4% dengan rata-rata sebesar 22.9% dengan 19 provinsi masih dibawah rata-rata. Sedangkan pada tahun 2014 rasio belanja modal Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata yakni sebesar sekitar 23% dengan rata-rata

sebesar 25.86% dengan 18 provinsi dibawah rata-rata.

Besarnya belanja pegawai di Kabupaten/Kota di Bengkulu ini disebabkan karena banyaknya pegawai di pemerintahan Bengkulu. Sehingga secara rutin pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk menggaji pegawai. Hal tersebut juga menandakan bahwa pemerintah setempat hanya melakukan pembangunan jangka pendek. Selain itu menurut Johan Budi SP juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat di Bengkulu dikutip dari laman www.bengkuluekspres.com penyebab lainnya ialah banyaknya temuan bahwa belanja pegawai tidak hanya sebatas membayar gaji rutin setiap bulannya, namun juga terdapat honor disetiap kegiatan dan nilainya sangat besar. Hal tersebut dikarenakan pemberian honor tersebut bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kegiatan. Semakin banyak kegiatan unit kerja pemerintah daerah, maka semakin besar honor bagi panitia kegiatan, sehingga akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi, dan menandakan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam mengelola anggaran. Pada tahun 2013-2014 Bengkulu mempunyai rasio tertinggi belanja pegawai terhadap total belanja se Indonesia.

Menurut BPS provinsi Bengkulu sedikit banyaknya belanja modal

dipengaruhi oleh besarnya kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang diakses dilaman www.bengkuluprov.go.id masih banyak permasalahan daerah pada daerah Bengkulu yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Misalnya di bidang infrastruktur wilayah. Infrastruktur transportasi di wilayah Provinsi Bengkulu masih belum memadai, misalnya pada transportasi darat mencakup masih rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas lalu lintas. Pada transportasi udara ialah keberadaan bandar udara termasuk perintis masih belum memadai untuk menampung *demand* (penumpang dan barang). Sedangkan pada transportasi laut, kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam. Selain itu juga masih terdapat permasalahan di bidang pendidikan yakni rendahnya mutu dan akses pendidikan. Pada bidang kesehatan, yaitu kurangnya tenaga medis dan paramedis yang belum terdistribusi secara merata. Pada bidang ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi oleh struktur primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian masih rendah. Pada bidang kesejahteraan rakyat dan

penanggulangan kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu menempati ranking ke-2 tertinggi di Sumatera.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada laman www.pedomanbengkulu.com (DPD RI) Dapil Bengkulu Riri Damayanti John Latief saat sidang paripurna di Senayan Jakarta menyatakan beberapa hambatan dalam percepatan pambangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan irigasi di Bengkulu ialah tidak mencukupinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu kendala lain untuk pambangunan ialah banyaknya kawasan hutan lindung dan cagar alam di Provinsi Bengkulu. Terhambatnya pambangunan infrastruktur tersebut mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi, tersendatnya pengembangan potensi wisata, dan mempersulit jalur lalu lintas perdagangan maupun sarana transportasi antar provinsi di Bengkulu. Selain itu adanya krisis listrik di Bengkulu yang disebabkan oleh kurangnya suplay daya, kurangnya debit air di PLTA Musi, dan pambangunan gardu induk yang belum maksimal. Sehingga adanya kerugian disektor bisnis, terganggunya sarana pendidikan maupun pemerintahan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Selain hal di atas menurut LAKIP yang menyebabkan permasalahan dalam pembangunan ialah optimalnya pembangunan “capacity building” pada institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus pelanggaran asusila dan narkoba serta korupsi di daerah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadikan hal tersebut menjadi lahan untuk korupsi. Di daerah Bengkulu partisipasi masyarakat dan aparatur Negara dalam melaksanakan pembangunan juga masih rendah. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam pembangunan daerah.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah sehingga mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan Bengkulu mempunyai PAD yang rendah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan sedikitnya PAD. Menurut Kuncoro (2004: 8-9) ketergantungan fiskal antara pusat dan daerah masih tinggi, hal ini dilihat dari relatif rendahnya PAD dan dominanya transfer dari pusat. Dari pernyataan tersebut, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu dapat diketahui rasio PAD terhadap total pendapatan tahun 2014 hanya sebesar 11,94%, sedangkan belanja daerah terhadap penerimaan/pendapatan sebesar 97,41%. Hal tersebut berarti bahwa PAD yang dihasilkan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk membayar upah gaji pegawai, dimana hampir 50% belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga untuk pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih sangat kurang. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan keuangan terhadap transfer pusat sangat besar.

Menurut Aliantor Harahap ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada laman www.kupasbengkulu.com, menyatakan bahwa yang menyebabkan PAD rendah ialah minimnya faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Masih rendahnya kualitas SDM dibidang

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD rendah dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali. Seperti potensi kemaritiman dan kepariwisataan. Pada Bengkulu dalam angka tahun 2014. Bengkulu memiliki panjang pantai hampir 525 Km, tetapi potensi kemaritiman Bengkulu masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dikarenakan dalam penangkapan ikan masih menggunakan alat-alat tradisional seperti pukat kantong dan jaring angkat. Di Bengkulu juga masih banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikembangkan, tetapi masih sedikit wisata yang berkunjung. Pada tahun 2013 kunjungan wisata asing perhari berjumlah 19 orang, dan wisatawan domestik 175 orang. Hal ini dikarenakan masih minimnya fasilitas jalan dan kapasitas bandara yang sedikit.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan dari APBN kepada daerah. Menurut Kuncoro (2004: 30), "...tujuan penting pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia." Dengan adanya transfer diharapkan pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamaya sehari-hari. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio transfer pada kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sebesar 75,35% dari total pendapatan dengan rasio DAU dan DAK sebesar 70,57% terhadap total pendapatan. Dari beberapa hal tersebut menunjukkan DAU dan DAK menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari.

Penggunaan DAU dalam kegiatan pemerintahan juga belum efektif dan efisien. DAU seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi DAU diguakan untuk menambah kapasitas pembangunan pada institusi pemerintahan dimana manfaatnya tidak dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat seperti untuk melakukan

belanja pegawai dan belanja hibah. Misalnya pada Kota Bengkulu tahun 2011 berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga DAU digunakan untuk kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan konstruksi gedung kantor, kegiatan pengadaan seragam untuk hari-hari khusus, kegiatan pembinaan olahraga, kegiatan pengiriman atlet, keseluruhan total dana hampir Rp. 300.000.000,00.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). Dalam penggunaannya DAK diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar

10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang memengaruhi Belanja Modal (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 41).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Dikarenakan terdapat masalah mengenai Belanja Modal, PAD, dan DAU sesuai dengan yang tertera di atas. Selain itu masih sedikitnya penelitian dengan topik terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu periode 2010 – 2014".

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang berusaha menyelidiki hubungan sebab-akibat melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang telah terjadi dan

menganalisis data yang ada untuk menemukan faktor-faktor penyebab (Azwar Saifuddin, 2001:9). Metode penelitian ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7)

Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10, dalam kurun waktu 5 tahun sehingga berjumlah 50. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai subyek penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Belanja Modal (Y)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:101).

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan mengambil gambar, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2011: 199).

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari masing-masing variabel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19). Deskripsi tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, *range*,

kurtosis, serta *skewness* (kemencengan distribusi).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2011: 105) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011: 106).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2011:139) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glesjer* yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji *glejser* menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari

perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011: 143).

Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghazali (2011: 110), uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokolerasi maka dinamakan ada problem autokolerasi. Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Wastin* (DW) dengan kriteria sebagai berikut:

1. $0 < d < dl$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya ditolak.
2. $dl \leq d \leq du$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya *no desicison*.
3. $4 - dl < d < 4$, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya ditolak.
4. $4 - du \leq d \leq 4 - dl$, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya *no desicison*.
5. $du < d < 4 - du$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusannya tidak ditolak.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007:261). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga dengan mencari koefisien regresi (b) dan konstanta (a) antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007:275).

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang telah diperoleh maka dilakukan analisis statistik deskriptif guna mengetahui jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi tiap variabel.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Var	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviasi
PAD	40	3138	81755	20834.9250	16388.08073
DAU	40	208428	602742	360519.8750	94232.40358
BM	40	44998	213413	113192.6000	34409.68042

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan data memenuhi persyaratan untuk diuji regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

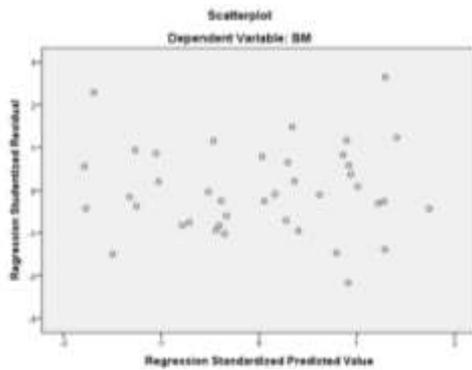
Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
PAD	0,212	4,726	Tidak terkena multikolinieritas
DAU	0,212	4,726	Tidak terkena multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinieritas dan memenuhi prasyarat uji asumsi klasik.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

dU	dL	Durbin Watson	Kesimpulan
1,6000	1,3908	1,706	Tidak terjadi autokorelasi

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 40 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,6000, dan batas bawah (dL) 1,3908. Durbin Watson (DW) terletak diantara dL dan 4 – dU. Nilai dL sebesar 1,3908 dan dU sebesar 1,6000, 4 – 1,6000 = 2,4000 dan hasilnya diperoleh 1,3908 < 1,706 < 2,4000. Maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Var	Nilai r		Sig	Konstanta	Koefisien
	r	r ²			
PAD	0,279	0,078	0,081	100.967,663	0,587

Hasil dari analisis diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r) yang bernilai positif sebesar 0,279. Koefisien determinasi (r²) sebesar 0,078 yang berarti bahwa sebesar 7,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD. Nilai konstanta sebesar 100.967,663 menunjukkan bahwa jika variabel PAD dianggap konstan, maka nilai belanja modal akan sebesar 100.967,663. Nilai koefisien regresi sebesar 0,587 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin PAD akan menaikkan belanja modal sebesar 0,587. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) yang

menyatakan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis besarnya koefisien determinasi (r^2) besarnya Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD hanya 7,8%. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam PAD, diantaranya masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD daerah rendah dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali.

Dari hasil pengujian di atas menandakan bahwa adanya keterkaitan antara PAD dengan Belanja Modal. Semakin PAD bertambah, maka Belanja Modal akan bertambah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan di daerah melalui Belanja Modal. Pembangunan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat juga daerah. Oleh sebab itu PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum(DAU)

Var	Nilai r		Sig	Konstanta	Koefisien
	r	r ²			
PAD	0,426	0,181	0,006	57.168,137	0,155

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014” terbukti. Ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,426 bernilai positif, maka jika PAD naik Belanja Modal juga akan ikut naik. Koefisien determinasi (r^2) bernilai 0,181 yang berarti bahwa sebesar 18,1% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Nilai konstanta sebesar 57.168,137 menunjukkan bahwa jika variabel DAU konstan, maka variabel Belanja Modal akan bernilai 57.168,137. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,155 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat 1 persen maka belanja modal akan meningkat sebesar 15,5% persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani (2011) menunjukkan bahwa DAU

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis besarnya koefisien determinasi (r^2) besarnya Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU hanya sebesar 18,1%. Hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU oleh pemerintah daerah digunakan untuk melakukan belanja pegawai dan belanja hibah dan tidak dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat seperti belanja modal, sehingga menandakan bahwa pemerintah daerah belum efektif dan efisien dalam penggunaan DAU.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara DAU dan Belanja Modal. Jika DAU mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan Belanja Modal juga mengalami kenaikan. DAU memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. dikarenakan DAU merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah selain PAD, DAU ialah salah satu dana transfer dari pemerintah. Dimana dana transfer tersebut penggunaannya diserahkan sepenuhnya pada daerah. DAU dapat digunakan oleh daerah untuk melakukan pembangunan didaerahnya melalui Belanja Modal. Belanja modal sangat penting manfaatnya bagi masyarakat. Dengan Belanja Modal akan meningkatkan pembangunan di daerah yang akan

memberikan manfaat bagi masyarakat juga daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda

Var	Nilai R		Sig	Konstanta	Koefisien
	R	R ²			
PAD	0,427	0,227	0,009	23.147,732	-0,977
DAU					0,306

Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,476. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,272 berarti bahwa sebesar 27,2% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU, sedangkan sisanya sebesar 72,8%. Nilai konstanta sebesar 23.147,734 berarti jika variabel PAD dan DAU konstan atau sama dengan nol, maka nilai Belanja Modal sebesar 23.147,734. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) variabel PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari hasil analisis besarnya koefisien determinasi (R^2) variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan

DAU hanya sebesar 27,2%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala-kendala terkait PAD dan DAU seperti yang telah dijelaskan di atas, selain itu masih ada variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama dapat meningkatkan besarnya Belanja Modal daerah. Belanja Modal digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meningkatnya pembangunan di daerah meliputi sarana dan prasarana, dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatnya pendapatan daerah melalui PAD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,279. Nilai konstanta sebesar 100.967,663 berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 100.967,663 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. Koefisien determinasi r^2 0,078 yang berarti sebesar 7,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD. Koefisien regresi PAD bernilai 0,587 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,587 persen dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426. Koefisien determinasi (r^2) bernilai 0,181 yang berarti bahwa sebesar 18,1% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Nilai konstanta sebesar 57.168,137 menunjukkan bahwa jika variabel DAU konstan, maka variabel Belanja Modal akan bernilai 57.168,137. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,155 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat 1 persen maka belanja modal akan meningkat

sebesar 15,5% persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,476. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,272 berarti bahwa sebesar 27,2% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU, sedangkan sisanya sebesar 72,8%. Nilai konstanta sebesar 23.147,734 berarti jika variabel PAD dan DAU konstan atau sama dengan nol, maka nilai Belanja Modal sebesar 23.147,734

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengalokasiannya sangat sedikit. Sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan yang produktif.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu masih sangat sedikit. Oleh

karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sumber-sumber atau potensi daerah yang belum tergali sehingga PAD dapat meningkat. Misalnya dengan mendeteksi sumber pajak yang belum tergali dengan cara menjarung wajib pajak baru atau dengan menerbitkan pajak baru. Selain itu dalam pemungutannya harus dengan pengawasan dan pelayanan yang baik.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum dikelola dengan baik. Disarankan kepada pemerintah daerah sebaiknya DAU dikelola dengan lebih baik lagi. Misalnya dengan meningkatkan Belanja Modal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel penelitian agar hasil penelitian generalisasinya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian (Edisi I Cetakan III)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwanto & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip

- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Husain Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kemenkeu. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*
- _____. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- _____. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Purbayu B. S. dan Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. (2004). *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Sadono, Sukirno. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Setiawan, A. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Sholikhah, Imoratus & Wahyudin, Agus. (2014). *Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa*, 553-562.
- Saranggih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alvabet.
- Yani, Ahmad. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.